

**Model Inkubator Kewirausahaan Hijau:  
Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul DIY**

*The Incubator Model of Green Entrepreneurship:  
Case Study in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency, DIY)*

**Hempri Suyatna<sup>1</sup>, Awan Santosa<sup>2</sup>, Ing Suwartanti Nayono<sup>3</sup> dan Istianto Ari Wibowo<sup>4</sup>**

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup>Email: hempry@ugm.ac.id HP: 08122769691

Diterima 19 Januari 2018, diperbaiki 20 Februari 2018, disetujui 14 Maret 2018

**Abstract**

*This research aims to generate an incubator model of green entrepreneurship that enables rural communities to improve their welfare by utilizing their local resources, by involving the society participation as much as possible and by that of ways that enables rural communities to preserve the environment. This research was conducted by using Participatory Action Research (PAR) methods, where the research team worked together with on-site partner institutions in doing the identification process and diagnosing the problems, and that of developing the model and plans of action, that of intervening and evaluating and as well as doing self-reflective thinking, and that of re-conducting the initial process on the ground of the latest achieved stage. The result showed that the incubator model of green entrepreneurship based on society-economy consisted of three dimensions: the dimension of green entrepreneurs, green institutions, and green business. Green entrepreneur dimension required green knowledge incubation through the implementation of Green Schools that contains the green curriculum design, classroom, lab, teachers and cadres. Green institution dimension required intervention for the incubation of local wisdom, local organizations, and networks. Green business dimension required intervention in the incubation of assets / land, production technology, costing, website (IT), marketing, bookkeeping, and waste management.*

**Keywords:** *business incubator; green entrepreneurship; economic democracy*

**Abstrak**

Riset ini bertujuan untuk menghasilkan model inkubator kewirausahaan hijau yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besar peranserta masyarakat dan cara-cara yang dapat memelihara kelestarian lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode *Participatory Action Reserach (PAR)*, di mana tim peneliti bersama dengan lembaga mitra di lokasi riset melakukan proses identifikasi dan diagnosis permasalahan, menyusun model dan rencana aksi, melakukan intervensi, evaluasi dan refleksi bersama, serta kembali melakukan proses awal dengan tahap yang sudah maju dari sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inkubator kewirausahaan hijau berbasis ekonomi kerakyatan meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi wirausaha hijau, kelembagaan hijau, dan bisnis hijau. Dimensi wirausaha hijau memerlukan inkubasi pengetahuan hijau melalui penyelenggaraan Sekolah Hijau yang memuat desain kurikulum, kelas, praktikum, guru, dan kader hijau. Dimensi kelembagaan hijau memerlukan intervensi untuk inkubasi kearifan lokal, organisasi lokal, dan jejaring. Dimensi bisnis hijau memerlukan intervensi dalam inkubasi pengelolaan aset/lahan, teknologi produksi, pembiayaan, website (TI), pemasaran, pembukuan, dan tata kelola sampah.

**Kata Kunci:** *inkubator; kewirausahaan hijau; ekonomi kerakyatan*

**A. Pendahuluan**

Pertumbuhan kapitalisme di dunia tidak saja mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat akan tetapi juga telah menyebabkan ketimpangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Mengacu data dari Oxfam, 80 individu

terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan 3,5 milyar penduduk miskin di dunia (Hall, Tandon, Tremblay (ed) 2016 : 5).

Di Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat dengan pesat. Pada tahun 2014,

Indonesia sudah termasuk dalam jajaran sepuluh besar perekonomian dunia. Masalahnya pertumbuhan yang pesat ini harus dibayar dengan ongkos sosial dan ekologis yang mahal. Indeks pembangunan manusia Indonesia tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, dan malah kesenjangan sosial dan spasial (geografis) semakin meningkat. Kerusakan lingkungan juga terjadi semakin cepat dengan meluas dan mendalamnya eksploitasi sumber daya alam. Indonesia saat ini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dengan 2,053 milyar ton pada 2011.

Kesenjangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan menjaga kelestarian lingkungan ini terjadi karena pola pembangunan ekonomi yang cenderung eksklusif dan didominasi oleh sektor industri modern dengan modal besar. Di kawasan perdesaan kepemilikan dan kendali atas penggunaan lahan bergeser dari konservasi kehutanan menuju agribisnis, dan dari petani dan masyarakat desa ke tangan non-petani dan industri modern. Masyarakat desa yang paling berkepentingan akan pelestarian lingkungan tidak berdaya menghadapi derasnya investasi yang mengubah ruang sosial mereka secara drastis. Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan ini mendorong jutaan petani dan masyarakat desa untuk keluar dari tempat asal mereka mencari penghidupan baru dan dengan begitu menimbulkan masalah baru di kota.

Kecenderungan ini sulit dicegah tanpa intervensi sistematis dari para perencana dan pelaksana pembangunan, terutama sektor publik dan pemerintah. Kebijakan baru diperlukan dan kebijakan lama yang baik perlu diperkuat pelaksanaannya untuk mengimbangi kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan pelestarian lingkungan. Di tingkat masyarakat perlu ada intervensi yang sistematis pula untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat, terutama masyarakat desa agar dapat mengembangkan produksi ekonomi, penataan ruang dan masyarakat, serta produksi energi terbarukan. Hanya dengan

begitu masyarakat desa dapat berperan lebih besar dan menentukan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada fase ini, intervensi dari luar harus dilakukan dengan tujuan utama memberikan stimulan kepada masyarakat untuk lebih berdaya, sehingga jangan sampai intervensi ini justru menyebabkan ketergantungan dan mandulnya kreativitas mereka. Kedudukan orang luar hanya sebagai fasilitator yang tidak menganggap dirinya jauh lebih pandai dari masyarakat akan tetapi ia bersedia belajar dari masyarakat (Suparjan dan Suyatno, 2003:23).

Upaya melakukan intervensi tentunya bukan sesuatu yang mudah karena menyangkut perubahan cara pandang dan tatanan sosial. Berbagai “intervensi hijau” yang coba diperkenalkan selama ini gagal justru karena diterapkan dari atas dengan berbagai target yang berada di luar kendali dan pengetahuan masyarakat sendiri. Beberapa proyek pelestarian lingkungan seperti penetapan wilayah konservasi malah mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat dan akhirnya bermuara pada penyingkiran masyarakat dari wilayah hidup mereka atas nama kelestarian hutan dan lingkungan.

Rute tempuh seperti ini sudah semestinya ditinggalkan. Diperlukan pendekatan berbeda dalam intervensi hijau, yang (1) melihat kaitan erat antara kegiatan ekonomi, kondisi lingkungan hidup, kehutanan, dan kehidupan sosial masyarakat serta (2) menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya perubahan. Kerangka riset ini bertolak dari pemahaman yang menyeluruh tentang kaitan antara pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal dengan tujuan agar setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Banyaknya warga masyarakat yang aktif untuk berpartisipasi, maka semakin ideal kepemilikan komunitas dan proses

Dengan demikian, apabila keswadayaan dan kemandirian masyarakat ini digunakan sebagai orientasi, maka proses pembangunan masyarakat harus berbasis pada kondisi sosio kultural masyarakat yang diperoleh melalui pengalaman hidup yang panjang. Manifestasi keswadayaan tercermin dari prinsip yang digunakan dalam pendekatan ini yakni masyarakat sendiri yang secara aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan atas dasar asas dari, oleh dan untuk masyarakat. Berbagai aktivitas terutama yang merupakan tindakan kolektif untuk meningkatkan kehidupan bersama muncul dari prakarsa masyarakat berdasarkan kesadaran akan persoalan dan kebutuhannya. Tindakan bersama sebagai implementasi dari gagasan dan prakarsa tersebut dapat berlangsung karena didorong oleh energi internal yang dimiliki oleh masyarakat (Soetomo, 2012 : 13).

Tujuan dari intervensi tersebut adalah untuk menanggulangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi hijau, dengan cara mengembangkan model inkubator kewirausahaan hijau yang berbasis produktivitas pertanian dan perikehidupan rumah tangga desa (*rural family life*). Riset ini juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Jokowi – yang dikenal dengan sebutan Nawacita – khususnya dalam hal membangun Indonesia dari pinggir (desa) dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keamanan manusia (*human security*).

Berdasarkan paparan tersebut, maka pengembangan model inkubator kewirausahaan hijau ini relevan diterapkan untuk program pengembangan ekowisata di desa-desa Miskin. Desa Nglanggeran yang berlokasi di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul DIY adalah salah satu desa yang memenuhi karakteristik tersebut. Desa ini memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yakni sekitar 31% (BPS Kabupaten Gunungkidul DIY, Tahun 2013). Di sisi lain desa ini memiliki potensi berkembangnya kewirausahaan hijau dengan keberadaan gunung api purba dan hutan di sekitarnya. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM tahun 2009 menunjukkan bahwa karakteristik kemiskinan sangat terlihat di desa ini. Tingkat kemiskinan di Desa Nglanggeran bukan semata-mata dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat namun juga karena rendahnya penguasaan mayoritas masyarakat atas faktor-faktor produksi. Di bidang produksi, beberapa masalah ekonomi rakyat mencakup sempitnya rata-rata penguasaan tanah atau lahan pertanian, penguasaan input produksi mencakup modal (modal material dan modal intelektual), termasuk didalamnya adalah masalah kewirausahaan. Pola sistem distribusi atau pemasaran yang ada di Desa Nglanggeran membentuk struktur pasar yang tidak menguntungkan bagi sebagian besar petani komoditas pertanian. Di bidang konsumsi, ketergantungan akan produk luar mencakup bahan pangan dan non pangan merupakan masalah terutama apabila produk tersebut dapat diproduksi sendiri. Untuk memecahkan persoalan kemiskinan tersebut, maka kehadiran model inkubator kewirausahaan hijau menjadi penting di dalamnya.

Riset ini bertujuan menghasilkan model inkubator kewirausahaan hijau yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besarnya peranserta masyarakat dan cara-cara yang dapat memelihara kelestarian lingkungan.

Secara khusus riset ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan aset-aset hijau yang dimiliki oleh masyarakat setempat baik modal insani (*human capital*), termasuk pengetahuan lokal (*local knowledge*), aset produktif, aset relasi rumah tangga, dan modal sosial;
- 2) Mengidentifikasi potensi dan praktek-praktek pemanfaatan sumber daya hijau secara komunal yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, termasuk peluang usaha hijau, beserta potensi pasar, potensi dana dan kebutuhan pembiayaan hijau masyarakat secara kolektif baik dari sumber dalam maupun luar desa;
- 3) Mengembangkan desain pendidikan, kurikulum, modul, dan metode pembelajaran

kewirausahaan hijau desa, beserta model kelembagaan hijau, dan pembangunan jejaring hijau dengan berbagai pihak di luar desa; 4) Mengujicoba penerapan model inkubator kewirausahaan hijau yang dihasilkan, yang terdiri atas model pendidikan hijau, kelembagaan hijau, pembiayaan hijau, pemasaran hijau, dan pengembangan jejaring hijau sebagai inkubasi kewirausahaan hijau berbasis komunalitas pertanian dan kehutanan terpadu, energi terbarukan, dan sistem informasi desa.

Riset ini memiliki manfaat sebagai berikut: a) Inkubator kewirausahaan hijau akan menjadi rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya terbarukan desa berbasis komunal yang saat ini justru lebih banyak dilakukan oleh sektor privat/swasta yang berakibat masih tingginya tingkat kemiskinan di desa. Pelestarian dan pengembangan pengetahuan lokal, nilai-nilai kebersamaan, dan tradisi usaha bersama akan dibangun lebih kuat dan berkelanjutan melalui inkubator tersebut.; b) Pasca UU Desa maka desa memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan, yang tanpa dukungan desain seperti inkubator kewirausahaan hijau maka dimungkinkan terjadi banyak misalokasi, ataupun pembangunan besar-besaran demi mengejar pendapatan asli desa yang tinggi dengan cara eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Inkubator kewirausahaan hijau akan menjadi laboratorium bersama setiap perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang mengkombinasikan pemanfaatan sumber daya terbarukan dengan inovasi dan kreatifitas produktif sebagai penciri entrepreneurial.; c) Inkubator kewirausahaan hijau sangat diperlukan disaat akses terhadap pendidikan yang semakin membaik di sisi lain justru berakibat pada makin berkurangnya SDM muda desa yang memilih bekerja di sektor modern perkotaan. Persoalan regenerasi dan kaderisasi yang menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan berbasis sumber daya terbarukan dapat dijawab melalui

pengembangan model inkubator yang akan menjadi media perekrutan dan pembentukan wirausaha-wirausaha hijau di perdesaan, yang dapat dimotori oleh generasi muda.; d) Inkubator ini akan menjadi jawaban operasional terhadap agenda Nawacita Presiden Jokowi yang mengedepankan pembangunan Indonesia dari pinggiran, yang tentu saja membutuhkan desain operasional lapangan dalam konteks desa dan potensi keterbaruannya. Inkubator kewirausahaan hijau akan menjadi cikal bakal pembangunan dari bawah yang bercorak komunal dan berwawasan lingkungan.

### **Urgensi Kewirausahaan Hijau**

Dalam kaitannya dengan ekosistem, Upaya peningkatan kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni aspek keamanan, basis material di dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik, kesehatan dan hubungan sosial yang baik. Aspek keamanan mencakup keamanan untuk hidup dalam lingkungan aman dan bersih, kemampuan untuk mencegah dari kerentanan ekologi. Basis material di dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik, terdiri atas kemampuan untuk mengakses sumber daya dan memperoleh pendapatan dari sumber daya yang ada. Aspek kesehatan mencakup kemampuan untuk memperoleh air bersih, bebas dari penyakit, kemampuan mendapatkan air minum, kemampuan memperoleh energi untuk menjaga panas dan dingin, dan hubungan sosial yang baik (hubungan kultural yang baik) (Alcamo (et.all), 2003 : 7).

Istilah ekonomi hijau pertama kali muncul dalam sebuah laporan kenegaraan *United Kingdom* yang disebut *Blueprint for a Green Economy* pada tahun 1989 yang berbicara tentang definisi pembangunan yang berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap kemajuan ekonomi. Dapat dikatakan juga bahwa hal ini yang menjadi salah satu pemicu menguatnya usaha penguatan konsep ekonomi hijau seiring dengan makin memburuknya beberapa krisis global yang saling terkait di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hingga saat ini masih

terus terjadi usaha untuk menyusun konsep universal tentang ekonomi hijau karena belum tercapainya kesepakatan pandangan tentang ekonomi hijau (Boromisa, et all, 2015). Pada tahun 2010 Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan Hidup/*United Nations Environmental Programme* (UNEP) merumuskan konsep yang mendefinisikan ekonomi hijau merupakan bentuk perekonomian yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkeadilan sosial, pada saat yang sama mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Atau dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan ekonomi yang rendah karbon, efisien sumberdaya, dan inklusif secara sosial.

Di dalam ekonomi hijau, pertumbuhan dan lapangan kerja didorong oleh investasi baik pemerintah maupun pihak lain, seperti swasta dengan tujuan pengurangan emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumberdaya alam, dan mencegah terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan. Negara maju atau berkembang peserta konferensi Rio+20, bersepakat untuk meninggalkan perekonomian yang bersandar kepada bahan bakar fosil, padat emisi gas rumah kaca dan tidak berkeadilan sosial. Mereka bersepakat pula untuk menuju sistem yang inklusif secara sosial, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan sumberdaya alam.

Upaya pengembangan ekonomi hijau tersebut memerlukan seorang wirausahawan yang secara kontinyu terus melakukan inovasi sistematis dan eksploitasi segala macam peluang untuk menciptakan nilai ekonomi, dan wirausaha hijau adalah seseorang individu yang melihat isu lingkungan sebagai peluang usaha dan berusaha melakukan inovasi dan eksploitasi terhadapnya. Seorang wirausaha hijau ingin usaha bisnis yang dilakukannya memiliki wawasan dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan perubahan sosial di sekitarnya (Schaper, 2010:80). Ketika kewirausahaan konvensional merupakan kegiatan yang menghubungkan antara pemasok dan pelanggan

untuk menciptakan dan mengubah pasar, maka kewirausahaan hijau juga harus menghubungkan antara perkembangan lingkungan hidup dan kesuksesan pasar (Laming dan Kuehl, 1997 dalam Schaltegger, 2002). Tanggung jawab wirausaha terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat serta penyebarluasan ide kewirausahaan hijau dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menggunakan pengetahuan hijau melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan manajemen pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

Pengembangan kewirausahaan hijau akan berhasil memberikan kemakmuran secara adil dan berkelanjutan jika ada keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh dalam proses ekonomi yang ada. Konsep demokrasi ekonomi dengan demikian, harusnya dijadikan paradigma di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Baswir (2005) menyebut ada tiga hal penting di dalam substansi demokrasi ekonomi yaitu partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi, partisipasi masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional dan kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat

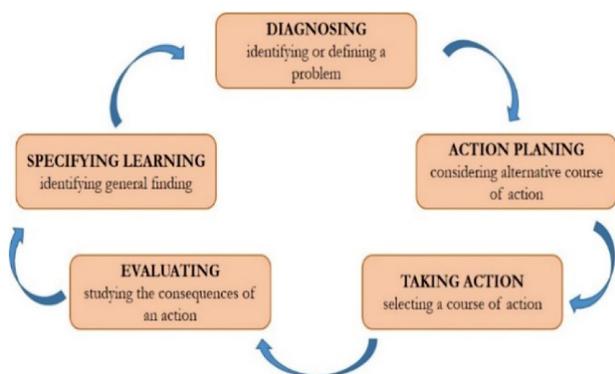
## **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul DIY. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang merupakan penggabungan antara riset dan aksi atau dikenal juga sebagai kaji tindak. Dengan PAR data dan informasi didapatkan lewat refleksi kritis tentang apa yang terjadi di lapangan, untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan modifikasi dan aksi baru. PAR adalah cara penguatan rakyat melalui penyadaran diri untuk melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka. PAR juga memiliki pengertian sebagai suatu proses

usaha kelompok sosial dalam melakukan kajian masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam PAR ini adalah pemetaan, perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, serta monitoring dan evaluasi melalui serangkaian observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan kembali untuk melakukan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus.

Dalam proses pengumpulan data observasi dilakukan dengan melakukan proses pengamatan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Nglanggeran seperti pengelolaan wisata, pertanian, pengolahan sampah dan sebagainya.

Gambar 1. Sifat dan Karakteristik *Participatory Action Research* (PAR)



Sumber : Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective (Susman, 1983)

PAR adalah cara penguatan rakyat melalui kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka (Peter Park, 1993). PAR juga memiliki pengertian sebagai suatu proses usaha kelompok sosial dalam melakukan kajian masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka (Corey, 1953).

Peneliti juga melakukan *live-in* di lokasi penelitian selama sekitar dua minggu sehingga diharapkan mendapatkan hasil pemetaan yang

lengkap dan detail. Untuk memperdalam data juga digunakan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada pelaku-pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat di Desa Nglanggeran. Beberapa informan yang diwawancarai adalah perangkat dusun, dan desa, pengurus sadar wisata (Pokdarwis), pengurus kelompok tani, pengurus kelompok PKK, pengelola sampah. *Focus Group Discussion* juga dilakukan untuk mempertajam perolehan data di lapangan. FGD dilakukan kepada kelompok-kelompok ekonomi yang ada di Nglanggeran (Pokdarwis dan kelompok tani) dan kelompok PKK (ibu-ibu).

### C. Pengembangan Kewirausahaan Hijau

Kegiatan utama pada tahapan ini adalah pengumpulan data untuk melakukan konfirmasi terhadap data awal yang telah dimiliki terutama yang berkaitan dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahapan ini juga dilakukan penggalian mengenai perkembangan desa setelah pelaksanaan riset sebelumnya. Masalah yang masih ditemukan dalam riset ini terkait dengan pertanian, ekowisata, dan pengelolaan sampah.

### Masalah Pertanian

Masyarakat menilai pertanian di Nglanggeran justru menurun karena banyak lahan yang berganti untuk penanaman kebun buah. Di samping itu, berkembang pesatnya pariwisata desa memperbanyak kera yang turun bukit dan mengganggu tanaman tani warga. Peternak dan petani banyak yang mengalami kendala kerja di musim kemarau. Banyak tanaman petani yang tidak tumbuh dan peternak kesulitan mencari tanaman hijau untuk pakan ternak. Industri pengolahan hasil pertanian di Desa Nglanggeran menghadapi masalah pasokan produk pertanian kakao ke kelompok usaha bersama (KUB) yang kurang optimal dan pemasaran produk warga yang masih sangat minim.

Masalah kapasitas SDM juga masih ditemukan karena banyak program pelatihan

yang selesai berjalan maka kegiatan warga pun ikut berhenti. Di samping itu, terdapat sebagian kecil warga yang tidak mau bergabung di dalam beberapa kelompok kerja sehingga cukup sulit untuk meningkatkan kapasitas diri karena seringkali program pelatihan yang masuk ke desa dilakukan dalam bentuk kelompok. Salah satu temuan masalah khusus terkait kelembagaan tersebut adalah penilaian bahwa budaya gotong royong yang melemah. Menurut warga hal ini terjadi setelah gempa Yogyakarta tahun 2006 kepulauan warga perantauan diikuti dengan individualisme yang semakin tinggi. Indikasi yang muncul adalah kelompok-kelompok usaha yang sudah beberapa kali mendapat pelatihan atau pendampingan cukup susah untuk diajak rutin berkumpul jika program sudah berhenti. Hal ini menyebabkan komunikasi dan koordinasi antarkelompok kurang lancar, sehingga keberlanjutan kelompok-kelompok sosial terancam.

### **Masalah Ekowisata**

Ekowisata Nglanggeran yang berkembang pesat tidak terlepas dari adanya berbagai permasalahan di dalamnya. Riset ini menemukan masalah ekowisata yang dikeluhkan masyarakat adalah fasilitas teknologi masih kurang. Di samping itu, masyarakat juga mengkhawatirkan belum ada kejelasan terkait kepemilikan lahan (milik Sultan atau warga). Di sisi lain, masyarakat juga menyambakan adanya eksternalitas pesatnya ekowisata di mana terjadi polusi suara dari kendaraan bermotor yang melewati jalan desa. Tidak semua warga menyediakan rumahnya untuk *homestay* dan walaupun menyediakan hanya beberapa rumah saja yang disinggahi sehingga banyak yang enggan terlibat di pengelolaan wisata kecuali jika ada acara kebudayaan. Terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap semakin bertambahnya dampak terhadap lingkungan sekitar jika ekowisata Nglanggeran semakin

ramai, meskipun sampai saat ini masyarakat belum merasakan dampak negatif secara signifikan.

Riset ini juga menemukan masalah SDM pengelola wisata, di mana jumlah pengelola wisata tiap dusun belum merata. Warga lainnya banyak yang enggan untuk terlibat dalam pelatihan ekowisata karena merasa tidak punya kemampuan sehingga pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Nglanggeran hanya mengandalkan kepada pihak Pokdarwis dan Karang Taruna. Masalah yang dikhawatirkan masyarakat adalah regenerasi pengelola ekowisata yang kurang, di mana hanya terdapat beberapa kader pengelola wisata yang dapat diandalkan. Hal ini berkaitan dengan temuan masalah lain di mana warga cenderung malas terlibat dalam pengelolaan ekowisata secara langsung karena sudah mempercayakan sepenuhnya ke Pokdarwis dan Karang Taruna. Warga akan benar-benar terlibat jika pengelolaan ekowisata tersebut melibatkan usaha ternak/tani mereka secara langsung. Selebihnya warga akan terlibat jika ada acara wisata insidental seperti kirab budaya.

Harapan yang diungkapkan oleh masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata antara lain adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, pemerataan pengelola, keterkaitan antara wisata dengan sektor lain, dan makin meningkatnya rasa kebersamaan. Pengelola wisata, secara khusus juga mengharapkan adanya sistem yang mendukung kinerja pengelolaan berupa intranet untuk menghubungkan setiap obyek wisata yang ada. Sistem ini diperlukan untuk memperlancar pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas. Pengelola ekowisata juga menyampaikan bahwa ada banyak pihak yang telah berkegiatan untuk mendukung kinerja mereka berupa penelitian, pelatihan, dan pendampingan. Secara lebih jelas mengenai potensi dan permasalahan di sektor wisata dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan Ekowisata Menurut Masyarakat

Aspek	Potensi	Masalah
Modal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak ruang yang bisa dikembangkan</li> <li>• Lahan sekitar masih luas</li> <li>• Fasilitas wisata cukup lengkap</li> <li>• Telah ada website</li> <li>• Subsidi per bulan sebesar 300.000 dari pokdarwis untuk masing-masing dusun dari pariwisata sehingga semua warga merasakan manfaatnya. Sebagian besar subsidi tersebut untuk kegiatan dusun seperti kirab budaya.</li> <li>• Tidak terlalu tahu apakah berdampak langsung terhadap penghasilan petani dan peternah namun semakin terkenal Desa Nglanggeran lewat pariwisata diharapkan para warga desa juga semakin mudah menjual berbagai hasil produk desa.</li> <li>• Semenjak Desa Nglanggeran semakin terkenal akan wisatanya, desa juga semakin ramai dan hal tersebut berdampak positif pada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas teknologi masih kurang</li> <li>• Belum ada kejelasan terkait kepemilikan lahan (milik Sultan atau warga)</li> <li>• Pariwisata yang maju memang mengundang banyak orang namun di sisi lain banyak sekali kendaraan lalu lalang jadi terkadang terlalu berisik untuk ukuran desa.</li> <li>• Tidak semua warga menyediakan rumahnya untuk homestay dan walaupun menyediakan hanya beberapa rumah saja yang disinggahi sehingga banyak yang enggan terlibat di pengelolaan wisata kecuali jika ada acara kebudayaan.</li> <li>• Ada kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan sekitar jika suatu hari benar-benar ramai walaupun memang belum ada dampak negatif yang dirasakan.</li> </ul>
Modal Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM pemuda banyak.</li> <li>• Telah ada pengelola website.</li> <li>• Banyak sekali pelatihan ekowisata yang telah masuk ke desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya jumlah pengelola wisata dari tiap dusun.</li> <li>• Warga lain banyak yang enggan terlibat dalam pelatihan ekowisata karena merasa tidak punya kemampuan sehingga lagi-lagi yang diandalkan untuk ikut adalah pihak Pokdarwis dan Karang Taruna.</li> </ul>
Modal Institusional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Pokdarwis banyak.</li> <li>• Punya banyak jaringan dan sudah banyak dapat bantuan dari berbagai pihak.</li> <li>• Terjalin kerjasama yang baik dengan berbagai kelompok usaha</li> <li>• Pokdarwis mengelola dengan cukup profesional.</li> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara Pokdarwis, Poktan, dan PKK.</li> <li>• Kelembagaan ekowisata dalam oleh Pokdarwis dan Karang Taruna tetap menjadi pihak yang paling diandalkan untuk pengelolaan wisata.</li> <li>• Kekerabatan sosial di warga desa masih sangat kuat walaupun tidak spesifik pada masalah wisata. Namun hampir apapun keputusan yang harus dilaksanakan di desa selalu melalui jalan musyawarah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regenerasi kurang, hanya beberapa orang yang bisa diandalkan.</li> <li>• Warga cenderung malas terlibat dalam pengelolaan secara langsung karena sudah mempercayakan sepenuhnya ke Pokdarwis dan Karang Taruna. Warga akan benar-benar terlibat jika pengelolaan tersebut melibatkan usaha ternak/tani mereka secara langsung. Selebihnya warga akan terlibat jika ada acara wisata insidental seperti kirab budaya.</li> </ul>

Sumber: Hasil FGD dan Depth Interview, 2016

### **Masalah Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah menjadi salah satu *output* penting dalam riset ini. Salah satu pertimbangan yang mendasari gagasan ini adalah dugaan awal mengenai produksi sampah dari kegiatan wisata. Jumlah pengunjung yang berjumlah 325.303 orang pada tahun 2014 dengan kecenderungan pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun akan menghasilkan sampah yang cukup banyak. Kondisi ini akan berdampak tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat jika tidak segera diantisipasi. Riset ini mencoba menghasilkan sebuah konsep mengenai pengelolaan sampah khususnya yang terkait dengan wisata sehingga dapat menekan dampak buruk atau bahkan dapat menghasilkan keuntungan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan.

Desa Nglanggeran telah memiliki modal awal yang cukup dalam hal pengelolaan sampah. Modal awal ini antara lain berupa produksi sampah yang cukup banyak dari hasil wisata, tempat pengumpulan sampah, pengelola tempat pengumpulan sampah, serta terutama kesadaran dan keinginan dari masyarakat. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Riset ini menemukan berbagai masalah tersebut, di antaranya TPS yang belum optimal, Alat-alat pengelolaan sampah yang dijanjikan pemerintah masih belum datang. Hambatan serah terima peralatan dari program pemerintah ke pengelolaan desa. Banyak warga yang tidak

tahu suatu saat nanti sampah akan diapakan walaupun alat-alat sudah lengkap, yang justru lebih efektif adalah fasilitas yang sangat sederhana namun hanya untuk pengolahan sampah ternak.

Keterbatasan SDM juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini pengelola belum bisa memanfaatkan sampah yang sudah terkumpul. Hal ini karena pengelola masih kurang terlatih dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga masih diurus oleh masing-masing warga namun kebanyakan hanya dikubur di halaman. Pengalaman mengikuti pelatihan yang terlalu susah bagi warga desa membuat mereka lebih memilih langsung praktek semampunya. Masyarakat menyadari bawah masih terdapat ketergantungan warga desa dari kegiatan pendampingan. Hal ini karena terdapat kekhawatiran kelompok tani/ternak tidak akan berlanjut dalam mengelola sampah-sampah ternak yang menjadi bahan baku untuk kegiatan ketika pendampingan sudah berakhir. Oleh karena itu masyarakat berharap terkait pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah nonorganik, pelatihan, pendampingan, dan sistem pengelolaan yang tidak memberatkan warga. Ketua karang taruna secara khusus menyampaikan mengenai komitmen dan keberlanjutan dari setiap kegiatan pendampingan.

Potensi dan permasalahan pengelolaan sampah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Potensi Pengelolaan Sampah Menurut Masyarakat

Variabel	Potensi	Permasalahan
Modal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada tempat pengumpulan sampah.</li> <li>• Sampah organik dari kegiatan ternak yang melimpah.</li> <li>• Jumlah sampah botol plastik dari kegiatan wisata sekitar 200 kg per bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS belum optimal.</li> <li>• Alat-alat pengelolaan sampah yang dijanjikan pemerintah masih belum datang.</li> <li>• Hambatan serah terima peralatan dari program pemerintah ke pengelolaan desa.</li> <li>• Banyak warga yang tidak tahu suatu saat nanti sampah akan diapakan walaupun alat-alat sudah lengkap, yang lebih efektif adalah fasilitas sangat sederhana untuk pengolahan sampah ternak.</li> </ul>
Modal Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pengelola sampah</li> <li>• SDM mencukupi.</li> <li>• Warga sudah cukup terbiasa dengan berbagai pelatihan sehingga kehadiran pelatihan pengelolaan sampah pasti akan sangat berguna bagi warga.</li> <li>• Warga desa memiliki semangat yang tinggi untuk menimba ilmu lebih dalam untuk mengelola sampah terutama yang menguntungkan seperti pengolahan sampah untuk menjadi pupuk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola belum bisa memanfaatkan sampah yang sudah terkumpul.</li> <li>• SDM kurang terlatih dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.</li> <li>• Jika pelatihan yang terlalu susah warga desa sulit untuk mengerti jadi lebih memilih yang langsung praktek saja.</li> <li>• Adanya ketergantungan warga desa dari kegiatan pendampingan.</li> </ul>
Modal Institusional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada SK dari desa untuk pengelola sampah.</li> <li>• Ada hubungan baik dengan Pokdarwis.</li> <li>• Pada dasarnya masyarakat sudah terlembaga dengan baik sehingga koordinasi antar pihak seperti pokdarwis, pemdes, dan warga untuk pengelolaan sampah pasti akan berjalan.</li> <li>• Pengelolaan sampah organik yang berasal dari limbah ternak telah dikelola dan diolah oleh kelompok ternak. Hasil olahan tersebut diambil oleh para petani di kelompok tersebut dengan mengisi uang kas yang sudah ditentukan. Jika petani berasal dari luar kelompok baru bisa mendapatkannya dari skema jual beli pada umumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang sudah terlembaga dengan baik masih belum bisa digerakkan untuk sampah karena masih minimnya pengetahuan dan pendampingan.</li> <li>• Pengelolaan sampah rumah tangga masih diurus oleh masing-masing warga namun kebanyakan hanya dikubur di halaman.</li> <li>• Ada kekhawatiran dari kelompok tani/ ternak jika pendampingan tidak ada apakah kelompok kerja mereka juga akan bertahan untuk mengelola sampah-sampah ternak yang sebenarnya menjadi bahan baku untuk kegiatan pertanian mereka juga.</li> </ul>

Sumber: Hasil FGD dan Depth Interview, 2016

Selain potensi dan permasalahan pada aspek pengelolaan sampah dan ekowisata pengembangan model inkubator kewirausahaan hijau juga didukung dengan berbagai potensi lain yakni keberadaan institusi sosial/ekonomi dan aktivitas websiste yang sudah dikelola oleh masyarakat. Keberadaan kelompok menjadi penting dalam kaitan mendorong

keberlanjutanprogram pembangunan wisata di daerah ini. Institusi sosial juga akan sangat berperan di dalam mendorong terjadinya harmonisasi sosial di dalam masyarakat dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Di Desa Nglanggeran ini ada lima kelompok yang menjadi dasar bagi institusionalisasi program-program pembangunan.

Tabel 3. Institusi Sosial/Ekonomi dalam Kegiatan Wisata di Desa Nglanggeran

Nama Kelompok	Kegiatan	Jumlah Anggota
Purba Rasa	Penyedia Kuliner dan Paket Belajar Olahan Kuliner	55 orang
Kumpul Makaryo	Pertanian	100 orang
Purba Wisma	Penyedia Penginapan	80 rumah
Pengrajin	Kerajinan	3 kelompok
Pedagang	Perdagangan	16 orang

Sumber: Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran, 2016.

Di era globalisasi ini, keberadaan media sosial juga menjadi sangat *urgent* di dalam pengelolaan ekowisata. Media massa berperan sebagai pusat informasi dan promosi atas aktivitas dan potensi wisata yang dikembangkan. Masyarakat Desa Nglanggeran ternyata sudah memiliki pengembangan website yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata. Daftar media yang dikembangkan oleh Kelompok Sadar Wisata dapat dijelaskan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Daftar Media yang Dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata

Nama Media	Alamat
Website	<a href="http://www.gunungapipurba.com/">http://www.gunungapipurba.com/</a>
Blog	<a href="http://kalisongku.wordpress.com/">http://kalisongku.wordpress.com/</a>
Facebook	<a href="http://www.facebook.com/Gunung.Api.Purba.Nglanggeran">http://www.facebook.com/Gunung.Api.Purba.Nglanggeran</a>
Twitter	<a href="https://twitter.com/GunungApiPurba">https://twitter.com/GunungApi Purba</a>

Sumber: Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran, 2016

### Model Inkubator Kewirausahaan Hijau

Upaya pengembangan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran dapat diidentifikasi akan membutuhkan bahan dasar berupa lingkungan alam dan lingkungan budaya. Oleh karena itu, dalam pengembangan model kewirausahaan hijau ini lebih ditekankan pada kesadaran kolektif warga masyarakat desa setempat sehingga dampak negatif dapat diminimalisasi dan dampak positif didapatkan secara optimal

(Suyatna, 2016 : 2016). Berdasarkan temuan riset dalam tahap sebelumnya mengenai potensi dan permasalahan yang dimiliki masyarakat, maka dibangun sebuah model yang dapat menggambarkan inkubasi kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran, yang meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi wirausaha hijau, dimensi kelembagaan hijau, dan dimensi bisnis hijau.

### Dimensi Wirausaha Hijau

Dimensi wirausaha hijau menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), yang inkubator pengembangan kapasitas SDM calon wirausaha hijau tersebut bertumpu pada forum belajar bersama masyarakat yang dalam riset ini diperkenalkan dengan istilah Sekolah Hijau. Sekolah Hijau yang diselenggarakan dengan forum-forum pertemuan yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Nglanggeran terdiri dari beberapa elemen, yaitu kurikulum, pertemuan, praktikum, guru hijau, dan kader hijau. Kurikulum memuat susunan materi pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kewirausahaan hijau yang dibutuhkan masyarakat. Kurikulum disusun berdasarkan penilaian kebutuhan (*need assessment*). Pertemuan merupakan metode penciptaan dan *delivery* pengetahuan kewirausahaan hijau di tengah-tengah masyarakat.

Praktikum adalah sarana untuk menerapkan pengetahuan tersebut, di mana Sekolah Hijau merupakan *action training* yang berorientasi pada tindakan dan praktek nyata kewirausahaan hijau di lapangan. Guru hijau adalah fasilitator belajar bersama yang berasal dari tim peneliti dan desa setempat. Kader hijau adalah anak-anak muda desa Nglanggeran yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin desa di masa depan, yang menjadi motor penggerak kewirausahaan hijau di desa.

### Dimensi Kelembagaan Hijau

Dimensi kelembagaan hijau menekankan pentingnya pendekatan dan pembangunan kelembagaan dalam pengembangan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran yang

inkubasinya bertumpu pada penguatan kearifan lokal, organisasi lokal, dan jejaring. Ada banyak teori yang sudah menjelaskan urgensi dari pentingnya kelembagaan ini. Adanya lembaga lokal yang ada di masyarakat diharapkan dapat menjadi aktivitas sosial ekonomi anggota (aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi/pemasaran). Meningkatkan daya saing usaha anggota/masyarakat, memungkinkan terjadinya penerapan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis pada kelompok, memperkuat posisi tawar anggota/masyarakat. Selain itu di dalam kelompok memungkinkan terjadi suatu *dialogical center* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok (memperkuat modal sosial di dalam masyarakat).

Berpijak dari hal tersebut, maka kewirausahaan hijau dikembangkan berpijak pada nilai-nilai dan budaya lokal berorientasi kelestarian lingkungan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat desa Nglanggeran. Demikian halnya sebagian nilai-nilai sosial budaya tersebut sudah berkembang menjadi pengetahuan tradisional, termasuk di dalamnya pengetahuan hijau, yang menjadi inkubator kewirausahaan hijau.

Inkubasi kewirausahaan hijau juga bertumpu pada organisasi lokal yang sudah ada di Desa Nglanggeran, seperti halnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pengembangannya ke depan dalam bangun usaha koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Organisasi lokal tersebut akan menjadi media inkubator bagi munculnya wirausaha hijau baru di Desa Nglanggeran, sehingga penguatan organisasi tersebut akan menjadi media bagi berkembangnya kewirausahaan hijau di tengah-tengah masyarakat desa. Koperasi dikembangkan untuk menaungi usaha-usaha masyarakat yang sudah berkembang, seperti *homestay*, olahan pangan, warung makan, kerajinan, dan ritel lokal, sehingga lebih berorientasi kelestarian lingkungan.

Media inkubasi yang penting juga dalam pengembangan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran adalah jejaring yang kuat antara organisasi lokal desa dengan berbagai pihak di luar desa seperti halnya dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, inkubasi kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran efektif dengan semakin banyaknya mitra jejaring yang akan memberi kesempatan luas kepada wirausaha hijau desa untuk mengembangkan produk dan pasarnya.

### **Dimensi Bisnis Hijau**

Dimensi bisnis hijau menekankan pada pentingnya material bisnis hijau, yang inkubasi pengembangan kewirausahaan hijau bertumpu pada penyediaan aset/ lahan, pembiayaan, teknologi produksi, pemasaran, teknologi informasi, pembukuan, dan teknologi lingkungan. Aset dalam hal ini adalah keberadaan ekowisata Gunung Api Purba dan embung di Desa Nglanggeran yang menjadi salah satu basis material penting bagi berkembangnya bisnis hijau yang akan melahirkan para wirausaha hijau baru. Di samping itu, keberadaan lahan pertanian, perkebunan, dan hutan juga menjadi modalitas penting dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran.

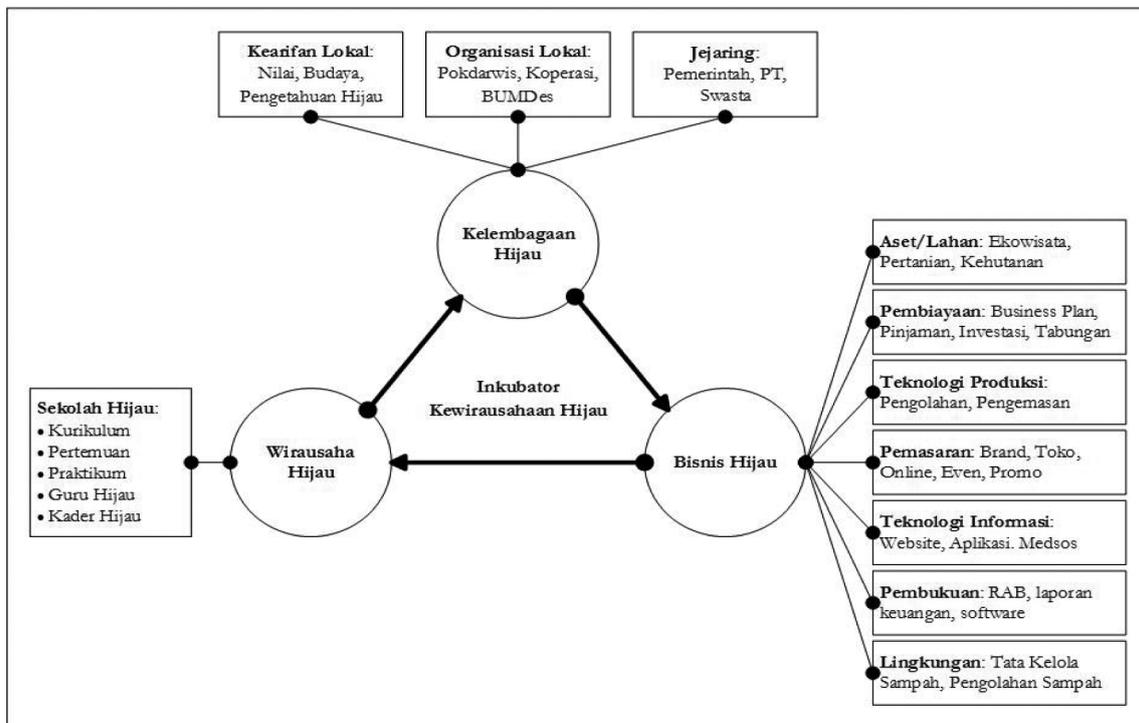
Penyediaan pembiayaan dalam berbagai instrumen seperti halnya pinjaman, investasi, dan tabungan yang dapat diakses untuk mengembangkan bisnis hijau dapat mendorong kemunculan wirausaha hijau baru di Desa Nglanggeran. Dalam hal ini ditunjang pembuatan rencana bisnis (*business plan*) sebagai prasyarat akses sumber pembiayaan tersebut. Keberadaan teknologi produksi diperlukan khususnya teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian yang terdapat di Desa Nglanggeran seperti halnya kakao, serta teknologi pengemasan yang akan meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasaran. Saluran pemasaran menjadi bagian penting dalam inkubator kewirausahaan hijau,

di mana produk-produk bisnis hijau setelah dilakukan *branding* akan dipasarkan secara luas baik melalui toko, *online shop*, maupun diikuti dalam berbagai *even* dan promo di luar Desa Nglanggeran.

Salah satu elemen penting inkubasi kewirausahaan hijau berikutnya adalah keberadaan teknologi informasi yang akan memperluas akses wirausaha hijau Desa Nglanggeran ke dunia internasional. Dalam hal ini maka inkubatornya adalah pengembangan website yang sudah dimiliki oleh Pokdarwis pengelola Gunung Api Purba Nglanggeran,

yang akan dikembangkan berikutnya melalui keberadaan aplikasi pendukung dan optimasinya media sosial. Bagian lain yang juga menjadi media inkubasi adalah keberadaan *software* pembukuan yang dapat menghasilkan laporan keuangan, sehingga dapat dimonitor secara luas dan terbuka oleh seluruh pelaku bisnis hijau di Desa Nglanggeran. Sebagai elemen penting yang dapat menunjang komponen lainnya dalam model inkubator kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran adalah keberadaan teknologi lingkungan, khususnya pengelolaan dan pengolahan sampah.

Gambar 2. Model Inkubator Kewirausahaan Hijau



Sumber : Olah data primer peneliti

Ujicoba model inkubator kewirausahaan hijau telah dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Hijau yang terintegrasi dalam berbagai forum pertemuan tradisional yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, dengan desain kurikulum dan pemateri sesuai kesepakatan bersama dengan mitra riset. Di samping itu ujicoba juga sudah dilakukan melalui pengembangan website Gunung Api Purba Nglanggeran dan pembuatan sistem

tata kelola sampah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Evaluasi ujicoba dan praktek-praktek lapangannya akan dilanjutkan dalam tahapan riset berikutnya.\

#### D. Penutup

Berdasar temuan riset di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: Model inkubator kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran bertumpu pada tiga dimensi inkubasi, yaitu

dimensi wirausaha hijau, dimensi kelembagaan hijau, dan dimensi bisnis hijau. Dimensi wirausaha hijau ditopang oleh keberadaan Sekolah Hijau yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu kurikulum, pertemuan, praktikum, guru hijau, dan kader hijau. Dimensi kelembagaan hijau ditopang oleh keberadaan kearifan lokal yang terdiri dari unsur nilai-nilai sosial budaya dan pengetahuan hijau, organisasi lokal yang terdiri dari Pokdarwis, koperasi, dan BUMDes, serta jejaring yang terdiri dari unsur pemerintahan, perusahaan, dan perguruan tinggi. Dimensi bisnis hijau ditopang oleh keberadaan aset/lahan, pembiayaan, teknologi produksi, pemasaran, teknologi informasi, pembukuan, dan teknologi lingkungan. Kedua, Masyarakat Desa Nglanggeran khususnya kelompok sadar wisata dan karang taruna menjadi motor penggerak di desa. Kelompok ini juga menunjukkan kemampuan untuk menyerap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar desa. Penerapan hasil riset merupakan salah satu contoh dari kemampuan tersebut. Di tengah berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi, keberadaan Pokdarwis mampu menjadi jembatan sinergi para pihak yang terkait dalam pengembangan ekowisata dan perekonomian desa Nglanggeran.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah: Secara akademis, perlu ada riset-riset lanjutan untuk melakukan penyempurnaan terhadap model inkubator kewirausahaan hijau yang dihasilkan. Rumusan model yang dihasilkan dari Desa Nglanggeran dapat diujicobakan ke daerah lain untuk mendapatkan penyempurnaan atas model ini sehingga dapat digunakan dalam skala nasional.

Secara praksis, model inkubator kewirausahaan hijau perlu terus didiseminasikan secara terus menerus sebagai salah satu jalan alternatif di dalam proses pembangunan berbasis komunitas. Dalam upaya pengembangan kewirausahaan hijau, partisipasi masyarakat menjadi kata kunci. Oleh karena itu penting mendorong keterlibatan masyarakat dalam

tahapan pembangunan. Kunci pengembangan demokrasi ekonomi akan ditentukan oleh sejauhmana pembangunan yang ada berbasis pada partisipasi masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah membiayai riset yang berjudul pengembangan Model Inkubator Kewirausahaan Hijau di Desa Miskin Sekitar Hutan Di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY tahun 2016.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memfasilitasi kegiatan riset.
3. Pemerintah Desa Nglanggeran dan Pokdarwis Nglanggeran yang telah memberikan ijin untuk terlaksananya penelitian ini.

### Pustaka Acuan\

- Alcamo, Joseph (et.all), 2003, *Ecosystem and Human Well Being : A frameworkk for Assesment/Millennium Ecosystem Assesment*, Wahsington Island Press.
- Baswir, Revrison, 2005, *Ekonomi Kerakyatan : Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian*, makalah dalam *KEEP 2005* di FE-UGM, Yogyakarta.
- Boromis, Ana Maria (et all), 2015, *Green Jobs For Sustainable Development*, Routledge Studies in Ecological Economics, New York.
- Corey, S.1953. *Action Research to Improve School Practices*. New York: Columbia University, Teachers College Press.
- Gerald I. Susman.1983. "Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective," ed. G. Morgan (London: Sage Publications)
- Hall, Budd, Rajesh Tandon dan Crystal Tremblay (et. all), 2016, *Strengthening Community Research Partnerships : Global Perspective*, United Nations Educational, Scientifis and Cultural Organization, Unesco Chair in Community Based Research and Social Responsibility in Higher Education.
- Park, Peter.1993. *What is participatory research? In Voices of change: Participatory research in the United States and Canada*, edited by Peter Park et al., 1-19. Westport, CT: Greenwood.
- Schaper, Michael T. (et.all), 2010, "Making Ecopreneurs: Developing Sustainable Entrepreneurship", Gower Publishing Limited, London.

Soetomo, 2012, *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Strietska-Ilina, Olga, et.al., 2011, “*Skills for Green Jobs: A Global View, Synthesis Report Based On 21 Country Studies*”, International Labour Office (ILO), Geneva.

Suparjan dan Hempri Suyatna, 2003, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyatna, Hempri dkk, 2016 *Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Kasus Pengembangan Patisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Energi Terbarukan, Di Desa Poncosari Kabupaten Bantul*, Gadjah Mada University Press.

Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2009, *Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan Di Desa-Desa Miskin Sekitar Hutan: Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DIY*

